

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA  
UTARA DALAM MENGATASI UJARAN  
KEBENCIAN DI TELEVISI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Menacapai Gelar  
Sarjana Sosial (S. Sos)**

**Oleh**

**RIZKA FADILLAH  
NIM: 11.15.3.024**

**Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



#### ABSTRAKSI

Nama : Rizka Fadillah  
NIM : 11.15.3.024  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Pembimbing I : Dr. Hj. Nurhanifah, MA.  
Pembimbing II : Dr. Winda Kustiawan, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi, mengetahui hambatan dan untuk mengetahui solusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ilmu komunikasi (komunikasi organisasi).

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti sebagai berikut, pada dasarnya peran KPID Sumatera Utara dikembangkan dari undang-undang No 32 Tahun 2002 yaitu: Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberi sanksi terhadap pelanggaran, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Bentuk-bentuk pengawasan KPID Sumatera Utara dalam mengawasi ujaran kebencian di televisi yaitu bentuk pengawasan eksternal, bentuk pengawasan internal, bentuk pengawasan preventif. Hambatan yang dialami seksi kepengawasan isi siaran. Aturan yang diberikan kepada KPI sebagai lembaga negara yang mengawasi lembaga penyiaran sebenarnya tidak bisa mencabut izin. Solusi yang diberikan KPID-SU untuk kebaikan kepada masyarakat, dengan merevisi UU No 32 Tahun 2002. Dari data yang didapat peneliti, peran Komisi Penyiaran Indonesia belum maksimal karena masih terbukti bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran tayangan seperti konten yang berupa ujaran kebencian di televisi.

Kata Kunci: Peran, KPID-SU, dan Ujaran Kebencian.

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA  
UTARA DALAM MENGATASI UJARAN  
KEBENCIAN DI TELEVISI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Menacapai Gelar  
Sarjana Sosial (S. Sos)**

**Oleh**

**RIZKA FADILLAH  
NIM: 11.15.3.024**

**Prodi: Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Nurhanifah, MA**  
NIP. 197507222006042001

**Pembimbing II**

  
**Dr. Winda Kustiawan, MA**  
NIP.198310272011011004

*se peps-I  
22/7  
2019*

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

No : Istimewa

Medan, 23 Juli 2019

Lamp : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

An. Rizka Fadillah

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Rizka Fadillah yang berjudul: Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang menaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

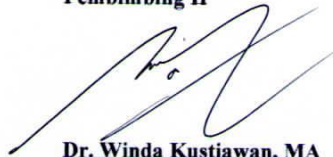
Wassalam.

**Pembimbing I**



**Dr. Nurhanifah, MA**  
NIP. 197507222006042001

**Pembimbing II**



**Dr. Winda Kustiawan, MA**  
NIP. 198310272011011004

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Fadillah

NIM : 11.15.3.024

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera  
Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebenian di Televisi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



**Rizka Fadillah**  
**NIM: 11.15.3.024**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi. Skripsi ini ditulis dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Sarjana Sosial (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Sungguh benar perkataan Allah atas kehidupan manusia Allah akan membeikan kemudahan bagi hamba-Nya yang menuntut ilmu. Karena itu syukur alhamdulillah kesulitan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mampu peneliti lewati dengan penuh keyakinan serta kerja keras. Peneliti tetap semangat dan terus berusaha dengan kemampuan yang Allah berikan. Demikian pula dukungan yang peneliti rasakan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Teristimewa kepada kedua orangtua peneliti yang amat sangat peneliti cintai dan sayangi Ayahanda H. Abdullah Sani dan Hj. Sakdiah, dengan cinta kasih sayangnya telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, hingga mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.sos). tiada kata yang dapat peneliti ucapkan “ Semoga Allah membalas semua cinta kasih yang kalian curahkan kepada anakmu ini”.
3. Kepada Bapak Rektor UIN SU Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag beserta para wakil Rektor dan Staf-Stafnya .
4. Kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN SU Dr. Soiman, MA. Yang banyak memberikan nuansa motivasi bagi saya dengan karakternya yang bertanggung jawab, ramah tamah beserta para Wakil Dekan dan Staf-Stafnya.
5. Kepada Bapak Ketua Jurusan KPI, Bapak Dr. Muktaruddin, M A. dan Bapak Dr. Winda Kustiawan, MA. selaku Sekretaris Jurusan, Pembimbing II peneliti yang telah memberikan arahan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurhanifah, MA. yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam kegiatan perkuliahan serta pegawai yang telah banyak membantu mahasiswa dalam kegiatan Akademis Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Kepada Kepala KPID-SU dan Bapak Drs. Syahrir selaku koordinator bidang kelembagaan, serta Bapak Drs. Jaramen Purba, M. AP selaku koordinator pengawasan isi siaran, dan juga Bapak Khairullah, S. Ikom selaku asisten bidang koordinator lembaga, Hafizhuddin Auzan Batubara S.pd sebagai Tenaga Recording KPID-SU yang telah memberikan izin dan data-data yang diperlukan kepada peneliti dalam melakukan pembuatan skripsi ini dan juga para anggota bidang pengawasan siaran dan staf yang telah membantu peneliti memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
9. Buat saudara-saudara saya, yaitu kakak tercinta Diana Agustina, S.pd yang selalu memotivasi peneliti. Adek-adek saya, Saniah, M. Basir, Roudhotul Jannah, M. Ismail Al-Hafiz yang selalu membuat tersenyum disaat peneliti sedang bosan dan jenuh dan selalu memberi semangat kepada peneliti.
10. Buat sahabat-sahabat tercinta, seperjuangan KPI-B, Mashondi Tanjung, Nurma Waddah L, Nur Ayu Sa'ada, Fatimah Khairiyah, Siti Fatimah, Tengku Melinda Situmorang, Sri Wahyuni, M. Ananda Hari Syahputra, M. Abdul



Fawwas, Saputra Siahaan, Dimas Adam Triyogi, Sofriadi Sitorus, Rizki Hadinarto, dan sahabat lainnya di jurusan KPI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama berjuang dalam suka ataupun duka dalam mengejar mimpi selama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU.

11. Buat sahabat saya Wulandari, dan sahabat-sahabat KKN 38 Desa Bengkel.

Atas keterbatasan kemampuan peneliti dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran sehat demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberi sumbangsih dan manfaat bagi pembaca.

Medan, 22 Juli 2019

Peneliti

Rizka Fadillah  
NIM: 11.15.3.024

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Batasan Istilah .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Gambaran Umum .....	13
B. Teori Komunikasi Linear (Model Komunikasi S-R) .....	15
C. Pengertian Ujaran Kebencian .....	17
D. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian .....	18
E. Aspek-aspek Ujaran Kebencian .....	21
F. Sarana atau Alat Ujaran Kebencian .....	23
G. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian .....	25
H. Kajian Terdahulu .....	27

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.....	39
B. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.....	57
C. Solusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Diagram Blok Teori Stimulus Respons.....	16
Gambar 2. Teknik Analisis Data.....	37
Gambar 3. Peran KPI.....	42
Gambar 4. Mekanisme Pengawasan Siaran.....	46
Gambar 5. Bentuk-Bentuk Kepengawasan.....	48
Gambar 6. Sanksi Pelanggaran.....	56
Gambar 7. Hambatan KPI.....	60
Gambar 8. Solusi.....	6

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	31
-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara I.....	68
Lampiran 2 Daftar Wawancara II.....	69
Lampiran 3. Daftar Wawancara III.....	72
Lampiran 4. Rekapitulasi Ujaran Kebencian di Televisi.....	73
Lampiran 4. Surat Izin Menelitian.....	75
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa komunikasi antarmanusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu.<sup>1</sup>

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa yunani yaitu tele (jauh) dan vision (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio TV.<sup>2</sup> Televisi juga merupakan salah satu media yang digemari oleh semua kalangan masyarakat baik dari anak-anak sampai orang dewasa, dan tidak terlepas dari fasilitas-fasilitas yang disajikan baik hal positif maupun negatif.

Sedangkan menurut Adi Badjuri, televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar (audio-visual), yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi

---

<sup>1</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 123

<sup>2</sup> Ilham Zoebazary, *Kamus Istilah Televisi dan Film*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 255

dari gambar tersebut.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang dapat menyiarkan siarannya dalam bentuk gambar atau video serta suara yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan kepada khalayak luas.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi.<sup>4</sup>

Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Terkait dengan televisi banyak berita tentang perkembangan yang terjadi di dunia saat ini, baik itu ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan politik. Dan berita yang sangat mencolok di saat ini adalah berita tentang maraknya ujaran kebencian,

---

<sup>3</sup> Adi Bajuri, *Jurnalistik Televisi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010 ), hlm. 39

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002



dimana banyak hujatan-hujatan yang dilontarkan di berbagai media terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Bicara tentang masalah ujaran kebencian ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat, seperti laporan terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dilaporkan ke polisi oleh Ketua Korlabi, Damai Hari Lubis. Said Aqil dilaporkan karena dianggap telah menebar ujaran kebencian melalui stasiun televisi. Damai melaporkan Said Aqil ke Bareskrim pada Senin (18/3/2019).

Damai, yang juga Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), menyebut Said Aqil membuat pernyataan bahwa di kubu capres Prabowo Subianto terdapat orang-orang dari kalangan radikal. Selain itu, Damai mengaku pernyataan Said Aqil yang dia anggap mengandung ujaran kebencian dilihat di media sosial. Tayangan di media sosial itu yang kemudian dijadikan bukti dan diserahkan ke polisi saat membuat laporan.

Konsep ujaran kebencian sebenarnya sudah ada dalam UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Secara praktis, aturan ini berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Seperti yang kita ketahui, batas antar-

golongan, agama, dan kelompok etnis di Indonesia semakin menegang dalam beberapa tahun belakangan ini. Terlihat bahwa sejak Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 lalu, penggunaan pasal ini memang semakin meningkat.

Kasus yang sama terjadi pada Stasiun Lembaga Penyiaran METRO TV pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 19.00 Wib, program siaran Head Line News, berdasarkan pemantauan dan analisis Tenaga Pemantau menemukan pelanggaran pada program siaran jurnalistik “ Head Line News” menampilkan potongan video seorang pemuda yang mengancam Presiden Jokowi tayangan tersebut dinilai tidak layak ditayangkan karena dapat memprovokasi berbagai pihak melanggar standar program siaran (SPS).

Pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 12.43 Wib, kasus yang sama terjadi pada stasiun lembaga penyiaran NET TV program siaran Net 12, berdasarkan pemantauan dan hasil analisis tenaga pemantau menemukan pelanggaran pada program siaran jurnalistik “Net 12” menampilkan video ujaran kebencian yang dilakukan oleh Iwan Ajisucipto yang memprovokasi TNI dan POLRI melanggar standar program siaran (SPS).

Melihat kenyataan dari bukti empiris ini, maka perlu diwaspadai peningkatan kasus-kasus kejahatan berupa ujaran kebencian yang sedang marak-maraknya baik di televisi maupun media sosial lainnya. Kasus ini merupakan salah satu perhatian khusus dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengawasi konten-konten yang diberikan media, karena perkembangan media khususnya televisi sangat diperlukan pengawasan yang merupakan salah satu signifikan pengukurannya.

Pengawasan untuk televisi yang dibutuhkan adalah pengawasan untuk manusia sendiri dan televisi.<sup>5</sup> Oleh karena itu peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara sangat dibutuhkan sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Terkait dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggung jawaban dan evaluasi.<sup>6</sup>

Ajaran agama Islam yang selalu menebar pesona rahmat untuk semua, sangat menentang tentang ujaran kebencian yang terjadi di kalangan masyarakat, karna dari situlah akan terjadi kekisruhan yang amat dahsyat. Ujaran kebencian sangat dibenci oleh Allah, karena bisa mengakibatkan perpecahan dalam umat Islam itu sendiri maupun dengan agama lainnya. Timbulnya permasalahan seperti fitnah, provokasi, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan permusuhan dan juga berakibat fatal seperti penganiayaan dan pembunuhan.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujrat ayat 11-12:

---

<sup>5</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Lintas Budaya dalam Dinamika Komunikasi Internasional*, (Bandung: simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 120

<sup>6</sup> <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-komisi-penyiaran-indonesia.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019, hari senin pukul 21:58.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ  
يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ  
لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Surah Al-Hujrat ayat ke 12:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم  
بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al quran & Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 518-519

Ayat diatas menunjukkan suatu perpecahan yang sesungguhnya terjadi dalam suatu masyarakat terhadap ujaran kebencian. Terlebih lagi, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sebagai agama yang cinta damai, sebagai agama yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai *ukhuwwah* dan melarang dari pada perbuatan yang tercela dan yang dapat menyakiti sesama manusia.

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas, yaitu dengan timbulnya pertanyaan tentang adanya program-program dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Komisi penyiaran Indonesia dalam mengatasi ujaran kebencian tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, menurut peneliti merasa penting untuk mengetahui dan mengkaji mengenai cara mengatasi terhadap ujaran kebencian di televisi.

Peneliti tertarik melakukan penelitian yang terkait dengan “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi”. Penelitian ini perlu dilakukan agar dapat di jadikan model dalam mengatasi ujaran kebencian baik di media massa dan media sosial maupun di lingkungan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan di cari, sehingga menemukan suatu jawaban. Berdasarkan fenomena-fenomena dan keterangan yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.
2. Bagaimana hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.
3. Bagaimana solusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.
2. Untuk mengetahui hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.
3. Untuk mengetahui solusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

#### **D. Batasan Istilah**

Batasan istilah dibuat untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul penulis, maka kali ini penulis akan menguraikan batasan-batasan dalam judul penelitian ini:

1. Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
3. Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *tele* (jauh) dan *vision* (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio TV.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ilham Zoebazary, *Kamus Istilah Televisi dan Film*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 255

4. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah sebagai ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini guna untuk mencapai tujuan diatas, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat kepada diri sendiri dan Komisi penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang seberapa besar Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Televisi. Sehingga dapat di Manfaatkan oleh masyarakat terutama diri sendiri diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan juga rujukan pada studi-studi selanjutnya. Serta dapat dijadikan sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dibidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Khususnya yang berkaitan dengan penyiaran. Serta dengan meneliti judul ini agar mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:



- a. Untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan pada studi-studi sberikutnya dan menjadi motivasi baik bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah lainnya agar terus maju dalam program-programnya. Selain itu juga dapat dijadikan rujukan dalam putaka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.
- b. Untuk instansi pemilik media diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dalam suatu berita yang disiarkan. Serta dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya dan sebagai bahan pertimbangan instansi yang berkaitan terutama bagi media siaran lainnya.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat seluruh Indonesia khususnya mahasiswa yang apabila melihat atau membaca berita tentang ujaran kebencian tersebut. Masyarakat mampu mengetahui fakta dalam suatu berita tersebut dan mampu menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat yang tidak paham apa maksud dari pesan yang disampaikan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk lebih mudah memahami isi kandungan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan dengan membuat sistematika pembahasan bab demi bab, serta beberapa sub judul, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan masalah penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teoritis membahas tentang kejelasan informasi yang masih samar-samar, pengertian ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian, aspek-aspek ujaran kebencian, sarana atau alat ujaran kebencian, perbuatan yang memicu terjadinya ujaran kebencian, kajian terdahulu.

BAB III Metodologi penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV Hasil penelitian, profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, program, sanksi atau tindakan, hambatan dan solusi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

BAB V Penutup yaitu kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Gambaran Umum**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi.

Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh Undang-Undang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana.

Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindak lanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Berikut ini adalah kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran:

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Maksud dan Tujuan Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia: Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran

3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
5. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Melihat ketentuan dalam ketentuan tersebut, maka KPI berkewajiban melakukan pengawasan dan mengontrol program-program dari semua lembaga penyiaran. Di samping itu, Undang-undang memberikan kebebasan seluas-luas bagi peranan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap program-program penyiaran yang ada.

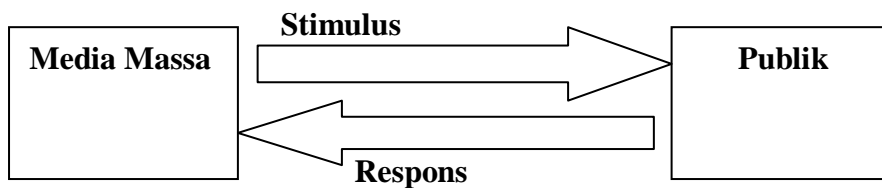
#### **B. Teori Komunikasi Linear (Model Komunikasi S-R)**

Teori komunikasi linear yang paling tua adalah teori stimulus respon (S-R theory). Model komunikasi stimulus respon pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi stimulus tertentu. Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan antara pesan pada media dan reaksi atau audience. Elemen utama dari teori ini yaitu:

1. Pesan (Stimulus)
2. Seseorang penerima atau receiver (organisme)
3. Efek (respon)

Prinsip stimulus respon ini merupakan dasar dari teori jarum hipodermik atau teori pluru. Disebut demikian karena teori ini meyakini bahwa kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan tindakan menyuntikkan obat yang langsung masuk ke dalam jiwa penerima pesan, atau seperti pluru yang ditembakkan dan langsung masuk ke dalam tubuh.

Teori model S-R ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen media massa: pengirim pesan, yaitu media penyiaran yang mengeluarkan stimulus dan khalayak media massa sebagai penerima yang menanggapi dengan menunjukkan respon sehingga dinamakan teori stimulus respon.<sup>9</sup>



**Gambar 1.**

### **Diagram Blok Teori Stimulus Respons**

---

<sup>9</sup> Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 65

### C. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat didefinisikan sebagai ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.<sup>10</sup>

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar.

Niat dari suatu ujaran memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata

---

<sup>10</sup> Hasan.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”. Diakses pada tanggal 22 maret 2019, pukul: 21:43 WIB

dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>11</sup>

#### **D. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Bentuk-bentuk ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yaitu :

##### **1. Penghinaan**

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun kelompok.<sup>12</sup>

##### **2. Pencemaran Nama Baik**

Pengertian Pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal dengan *defamation* ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>11</sup> Ninik Wisiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalah ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987), hlm. 133

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991), hlm. 134



### 3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaana dalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau katakata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

### 4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (1) Barangsiapa secara melawan hukum

memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 44 Pasal 310 ayat.<sup>13</sup>

- a. KUHP memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

#### 5. Memprovokasi

Menurut KBBI memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.<sup>14</sup>

#### 6. Menghasut

Menurut R. Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. 47 Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 135

<sup>14</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, ), hlm. 275

## 7. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R. Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan. Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang suatu kabar bohong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial.<sup>15</sup>

### **E. Aspek-aspek Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku, mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.
2. Agama, menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Aliran keagamaan menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*,, hlm. 136

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

4. Keyakinan/kepercayaan, menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.
5. Ras, menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
6. Antar golongan penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
7. Warna kulit menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
8. Etnis menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
9. Gender segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan

pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

10. Kaum difabel Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.
11. Orientasi seksual, ekspresi gender kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.<sup>16</sup>

**F. Sarana atau Alat yang digunakan untuk melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu:

1. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
2. Spanduk atau banner mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Jejaring media sosial, Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:

---

<sup>16</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Realita Publisher. 2015), h. 13

- a. Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- b. Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.
4. Penyampaian pendapat di muka umum menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
5. Ceramah keagamaan, Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
6. Media massa cetak atau elektronik mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
7. Pamflet menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tjipta Lesmana, "Hate Speech, Kenapa diributkan?" *Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia*" tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uph->

## **G. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sektor di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Di sisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, di antaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan.<sup>18</sup>

Salah satunya saat ini ujaran kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial.

Tindakan ujaran kebencian di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*hate speech*), sebagai berikut:

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

---

bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”. Diakses pada tanggal 22 maret 2019.

<sup>18</sup> Moh. Kemal Darmawan,. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya. 1994), hlm.

- a. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.
- b. Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.
2. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
4. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.
5. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.
6. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.



## H. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian skripsi mery febrianti Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Faktor Melakukan ujaran kebencian dalam media sosial”.

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yaitu daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas.
2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi

dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Hasil penelitian Endah Sri Rahayu 2017 yang berjudul Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2012):

1. Sikap kognitif mahasiswa KPI 2012 terhadap ujaran kebencian di media sosial adalah positif. Sikap positif ini diungkapkan dengan mahasiswa yang setuju bahwa materi atau pengetahuan mengenai ujaran kebencian perlu diberikan atau dijelaskan kepada masyarakat dan dijadikan bahan diskusi atau bahasa diperkuliahan untuk menambah pengetahuan tentang ujaran kebencian
2. Sikap efektif mahasiswa KPI 2012 terhadap ujaran kebencian di media sosial adalah negatif. Sikap negatif ini menunjukkan perasaan dan penilaian negatif mahasiswa terhadap konten-konten yang berisi ujaran kebencian di media sosial. Mahasiswa merasa tidak suka dan terganggu apabila menemukan konten yang berisi ujaran kebencian di media sosial.
3. Sikap konatif mahasiswa KPI 2012 terhadap ujaran kebencian di media sosial adalah positif. Sikap positif ini ditunjukkan dengan mahasiswa yang setuju dengan adanya peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian yang dapat termasuk tindak pidana. Selain itu mahasiswa merasa perlu berhati-hati dalam mengirimkan atau menerima pesan di media sosial dengan melihat kembali sumber dari berita tersebut.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama, Mery Febriani membahas tentang analisis terhadap faktor ujaran kebencian sedangkan dengan peneliti yang kedua, dia lebih condong kepada analisis kasus tentang munculnya meme kekalahan Prabowo dan kemenangan Jokowi pada saat terpilihnya Presiden Republik Indonesia 2015.

Sedangkan dalam penelitian saya, lebih kepada Peran Komisi Penyiaran Indonesia, di mana Komisi Penyiaran Indonesia mampu berperan menanggulangi ataupun mengatasi adanya ujaran kebencian di televisi. Sehingga memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya ujaran kebencian tersebut. Dan dapat mendidik masyarakat untuk dapat memilah dan memilih informasi yang tersebar dan dapat mengatasi, ketika ujaran kebencian tersebut terjadi di dalam televisi dan media lainnya.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Komisi penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara di Jl. Adinegoro No. 7 Medan.

##### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mempunyai karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial.

Penelitian kualitatif, terdiri dari semua data atau informasi yang diperoleh atau dikumpulkan tidak berbentuk angka, tetapi dalam bentuk kata, kalimat, pernyataan dan konsep yang kemudian dikembangkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata , serta gambaran holistik yang

rumit<sup>19</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menekankan pada analisis naturalistik terhadap fenomena yang diteliti. Alasan utamanya karena penelitian ini dimaksud untuk memahami permasalahan peran Komisi Penyiaran Indonesiadalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

Setingan alamiahnya dan menginterpretasikan fenomena ini berdasarkan pemaknaan yang diberikan informan. Oleh karena itu, kajian ini harus dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah dan penelitian ini didapatkan tidak bisa menggunakan angka-anga dalam menggambarkan suatu fenomena tetapi hanya dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

### **C. Informan Penelitian**

Penelitian tidak lengkap apabila tidak ada informan penelitian, maka dari itu untuk mempermudah suatu penelitian inti pokok masalah ialah adanya objek yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Adapun informan penelitiannya ialah: Tabel I. Informan Penelitian

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>USIA</b>
1	Drs. Muhammad Syahrir	Koordinator Bidang Kelembagaan	53
2	Drs. Jaramen Purba, M. AP	Koodinator Pengawasan Isi siaran	61
3	Khairullah, S. Ikom	Asisten Koordinator Bidang Kelembagaan	24

---

<sup>19</sup> Lexy, Mueleog, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 6

4	Hafizhuddin Auzan Batubara S.pd	Tenaga Recording KPID-SU	24
---	---------------------------------	--------------------------	----

Alasan peneliti menjadikan empat informan diatas sebagai sumber informasi peneliti adalah karena informan tersebut dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dikatakan kompetensi karena informan tersebut memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup mendalam tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok atau utama yang peneliti peroleh dari informan peneltian.
2. Sumber data skunder, yaitu sumber data pendukung atau tambahan yang peneliti peroleh dari buku-buku dan beberapa literatur-literatur yang reevan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan dan langsung dari informan. Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara mendalam. Pengertian wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang *relative* sedikit lama.

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Peneliti telah mempunyai rancangan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan, terkait mengenai tanggapan Komisi penyiran Indonesia terhadap ujaran kebencian di televisi, apa program atau himbauan untuk mengatasi ujaran kebencian, serta apa hasil dan hambatan yang di dapatkan.

2. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>21</sup> Metode dokumentasi adalah mencari

---

<sup>20</sup> Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hlm. 162

data mengenai hal-hal atau variabel dengan melakukan teknik pengumpulan data dan menginvestasi dokumen-dokumen yang relevan serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian akan menggali data melalui dokumen yang ada pada Komisi Penyiran Indonesia, baik berupa *wibesite*, buku-buku, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Observasi

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek peneliti untuk melihat dari dekat yang dilakukan. Teknik pengumpulan data di mana seorang peneliti melakukan pengamatan pada masyarakat yang menjadi obyeknya. Teknik ini terdiri dari pengamatan (observasi) dan observasi partisipasi.

Pengamatan atau observasi seorang peneliti tidak masuk ke dalam masyarakat tersebut. Ia bisa saja hanya melihat dengan sepasang matanya kegiatan dan benda-benda budaya atau dibantu dengan alat-alat lain, seperti kamera. Pada teknik ini, interaksi sosial dengan para informan sama sekali tidak terjadi.

### **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data dalam wawancara dengan membuat daftar pertanyaan terstruktur yang akan diajukan kepada informan, menggunakan telpon genggam untuk *recorder*, pensil dan *ballpoint*. Daftar wawancara yang digunakan hanya permasalahan yang ditanyakan mengenai suatu program, bentuk-bentuk,

---

<sup>21</sup> Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73



tindakan atau sanksi hambatan dan solusi Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

Instrumen pengumpulan data dalam dokumentasi hanya menggunakan kamera untuk mengambil data diperlukan, arsip-arsip yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia tentang program atau himbauan dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi.

Instrumen Pengamatan atau observasi non partisipasi dimana seorang peneliti tidak masuk ke dalam masyarakat tersebut. Hanya melihat dengan sepasang matanya kegiatan dan benda-benda budaya atau dibantu dengan alat-alat lain, seperti kamera. Pada teknik ini, interaksi sosial dengan para informan sama sekali tidak terjadi

#### **G. Teknik Analisis Data**

Studi kualitatif, analisis data adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk menyeleksi, mengkategorikan membandingkan dan menginterpretasikan data untuk membangun gambaran secara komprehensif tentang fenomena atau topik yang diteliti. Dari penelitian ini peneliti berusaha memaparkan keadaan secara resmi dari cara mengatasi ujaran kebencian di televisi. Maka proses analisis data adalah terus menerus penyajian data yang sudah diperoleh di lapangan secara apa adanya.

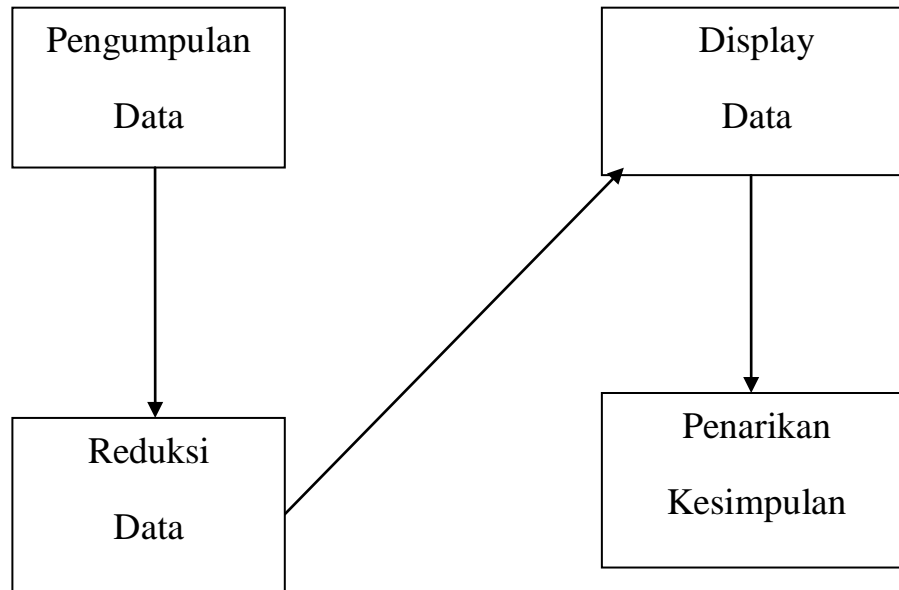
Konteks ini, untuk menganalisis data yang terkumpul dari hasil wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi, peneliti mengadaptasi teknik analisis data kualitatif sebagaimana yang disarankan oleh Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah penarik kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validasinya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian berdasarkan indikator pertanyaan yang peneliti buat, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan cara: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mattew B Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Meode Baru*, (Jakarta: UI Pers, 1992), hlm. 19

Gambar 2. Teknik Analisi Data



Sumber. Miles dan huberman.

#### H. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjaminan keabsahan data yang umum terdapat dalam penelitian kualitatif yaitu kredibilitas dan transferabilitas (*credibility and transferability*). Untuk menjamin tingkat kepercayaan data yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti akan melakukan dua hal berikut:

1. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh data hasil wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto, alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, alat perekam suara) sangat di perlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti.

## 2. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah emuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi.**

Media massa senantiasa mengingatkan lembaga penyiaran wajib melakukan ralat bila dalam isi siaran dan atau berita diketahui terdapat kekeliruan atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran atau berita. Berdasarkan ketentuan undang-undang penyiaran. Sebagai konsekuensi dari kepatuhan serta pemenuhan aspek hukum dan etika media massa, setiap mata acara yang disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio wajib memiliki hak siar.<sup>23</sup>

Pada pasal 8 dijelaskan bagaimana sebenarnya peran yang harus dijalankan oleh KPI sebagai lembaga yang mengawasi dalam bidang penyiaran:

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Muhammad Syahrir sebagai koordinator kelembagaan menyatakan:

“Setiap program yang kami buat itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mengandung tentang penyiaran serta pengawasan terhadap suatu media maupun isi siaran.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama), hlm. 180

<sup>24</sup> Muhammad Syahrir, *Peran dan Program KPID-SU*, Wawancara Pribadi, 03 Juli 2019, Pukul, 10:17

Pernyataan ini juga didukung oleh bapak Khairullah, S. Ikom, sebagai asisten koordinator bidang kelembagaan beliau mengatakan:

“Memang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terutama pasal 8 ayat (2) huruf c yang berbunyi: Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”.<sup>25</sup>

2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Jaramen M. AP sebagai koordinator isi siaran menyatakan:

“Bahwa kami dari pihak KPID-SU wajib mengawasi P3PS dan lembaga penyiaran wajib pula mematuhi. Setiap lembaga penyiaran radio dan televisi wajib pula melakukan sosialisasi serta internalisasi P3SPS”.<sup>26</sup>

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi ujaran kebencian adalah:

### **1. Membuat Program dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi.**

- a. Menetapkan standar program siaran

Standar isi siaran yang berisikan tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran.

- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.

Merupakan penjabaran teknis pedoman perilaku penyiaran yang berisikan tentang batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh ditayangkan pada program siaran.

---

<sup>25</sup> Khairullah, *Program KPID-SU*, Wawancara Pribadi, 03 Juli 2019, Pukul, 10: 45

<sup>26</sup> Jaramen, *Pengawasan Isi Siaran*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 08 juli 2019, 09:35WIB.

- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Suatu kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang isi siaran yang di tayangkan.

- d. Memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Ketika ditemukan ada pelanggaran dilakukan lembaga penyiaran terhadap standar dan pedoman UU. Maka KPI memiliki wewenang untuk mencabut izin siaran.

- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.<sup>27</sup>

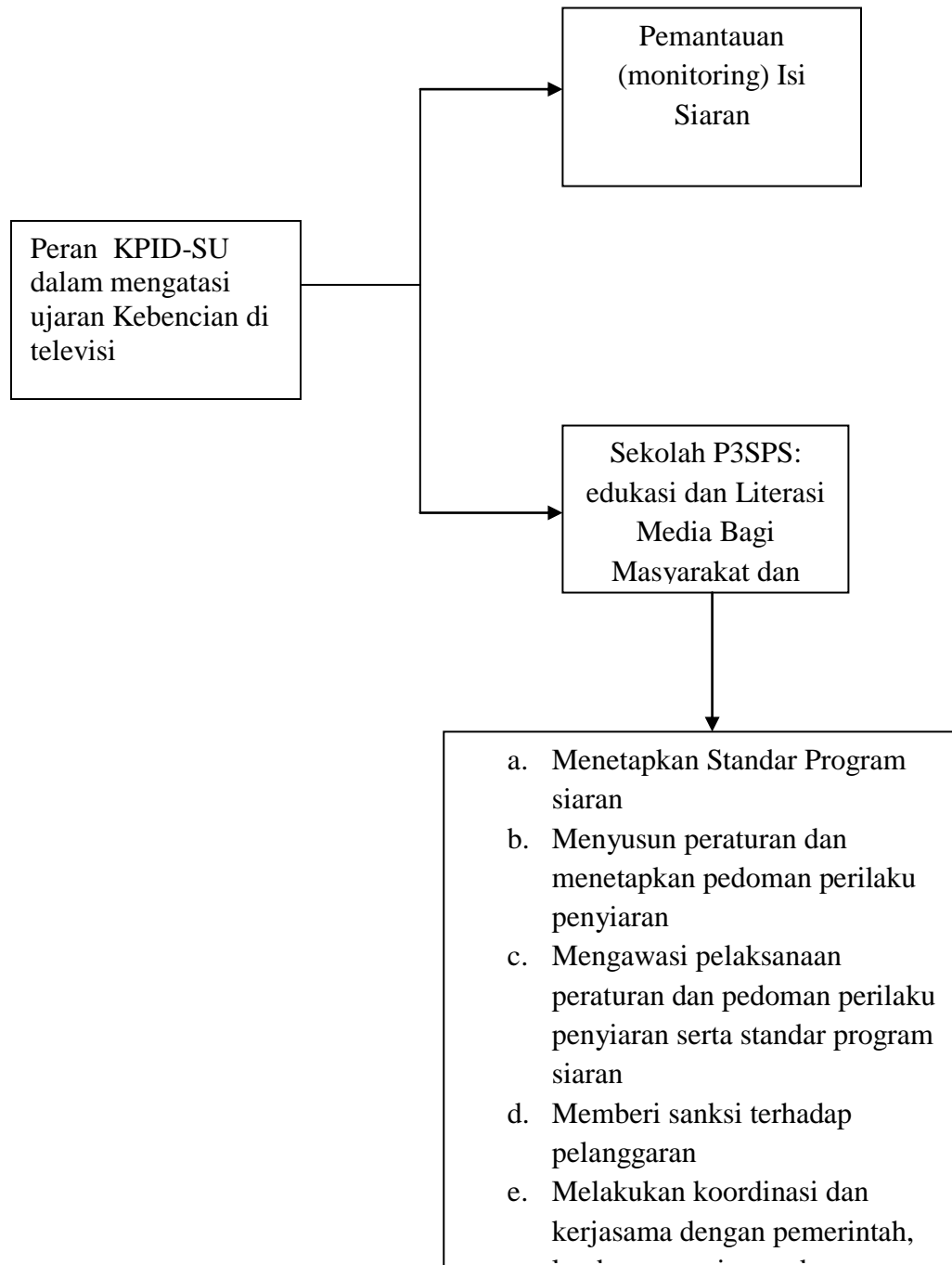
Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa inti kegiatan atau program yang dilakukan berupa suatu peran yang dijalankan lembaga KPID-SU dalam mensosialisasikan P3SPS kepada masyarakat dan lembaga penyiaran, serta melaksanakan pengawasan internal, karena dalam UU No. 32 Tahun 2002, Bab V, Pasal 48, ayat (3) berisi mengenai “KPID-SU wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, *Tentang Penyiaran*, Medan: KPI, 2018, hlm. 8

Gambar 3. Peran KPID-SU





## 2. Melakukan Pengawasan Isi Siaran

Pengawasan tidaklah sesuatu yang sangat mudah untuk dilaksanakan, pasti membutuhkan sebuah proses mulai dari waktu, biaya, tenaga maupun lainnya sehingga tercapai sebuah tujuan dari pengawasan itu sendiri. Seksi pengawasan isi siaran KPID-SU dalam mengawasi ujaran kebencian di televisi melalui beberapa dengan proses pengawasan yang berbeda.

Ada beberapa bentuk-bentuk kepengawasan dalam program siaran:

### a. Pengawasan Eksternal (*external control*)

Pengawasan eksternal atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi.

### b. Pengawasan Internal

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.

### c. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.<sup>28</sup>

Penjelasan diatas bahwa sebenarnya pada dasarnya pengawasan isi siaran tidak hanya KPID-SU yang melaksanakan, akan tetapi pihak televisi dan masyarakat harus ikut andil karena isi siaran ini dibuat untuk masyarakat (publik), tanpa adanya kerjasama pihak televisi dan masyarakat serta tidak mau bermusyawarah dalam

---

<sup>28</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafikan, 1986), hlm.

menciptakan konten yang lebih sehat maka tujuan pengawasan tidak akan tercapai dan bisa dikatakan gagal.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Jaramen Purba, M. AP sebagai koordinator pengawasan isi siaran, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi pengawasan isi siaran yaitu:

“Kami wajib mengawasi P3PS dan lembaga penyiaran wajib pula mematuhi. Setiap lembaga penyiaran radio dan televisi wajib pula melakukan sosialisasi serta internalisasi P3SPS agar menjadi pengetahuan dan pedoman setiap pelaku penyiaran, terutama bagi personal yang terlibat dalam proses produksi siaran, sejak tahap perencanaan sampai tahap penayangan dan evaluasi sebuah penayangan. Pada saat yang sama, selain melakukan monitoring siaran televisi selama 24 jam. KPI juga membuka kotak pengaduan 24 jam secara online”.<sup>29</sup>

Pernyataan diatas didukung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 50 yaitu:

1. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.

Sebagaimana yang dimaksud diatas KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.

2. KPI wajib menindak lanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar.

Masyarakat dapat berpartisipasi lewat pengaduan atas tayangan yang bermasalah seperti kasus ujaran kebencian dan sebagainya yang berdampak buruk bagi masyarakat.

---

<sup>29</sup> Jaramen Purba, *Pengawasan Isi Siaran*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 08 juli 2019, 09:47 WIB.

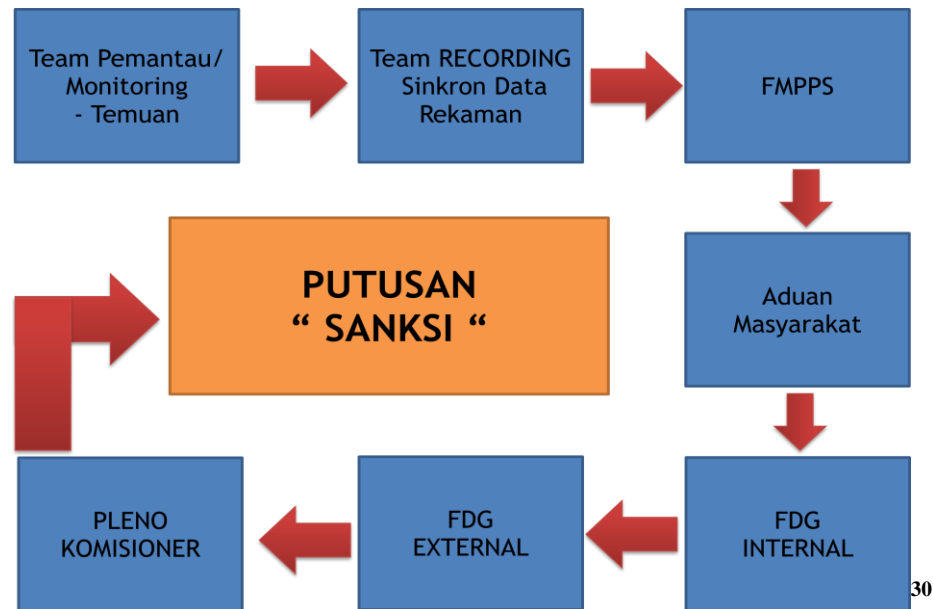
3. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran terkait.

Daerah Sumatera Utara dapat menghubungi melalui email resmi [kpido.sumut@yahoo.com](mailto:kpido.sumut@yahoo.com), nomor telepon (061) 4520625, atau bisa mendatangi langsung kantor KPID-SU di Jl. Adinegoro No. 7 Medan, sudah menjadi kewajiban KPI untuk mendengar dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat. Karena masyarakat adalah pemilik sah frekuensi.

Penjelasan diatas dikaitkan dengan kasus ujaran kebencian bahwa kebebasan berbicara itu harus dikontrol secara hati-hati dengan mengedepankan etika dan norma yang ada. Saat ini, publik bebas mengeluarkan pendapat dan menyebarkan informasi apapun melalui media tanpa harus ada verifikasi dan validasi. Ini dampaknya berbahaya jika informasi yang disampaikannya tidak benar dan berisikan kebencian.

Lembaga penyiaran juga harus berperan menjaga kohesitas sosial, dengan tidak menyebarkan informasi dengan muatan sara apalagi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sebaliknya lembaga penyiaran perlu menyampaikan berita yang mampu membangun optimisme publik.

Gambar 4. Mekanisme Pengawasan Siaran



## Mekanisme Pengawasan Penyiaran

## 1. Team Pemantau dan Monitoring KPID-SU

Team ini bertugas menemukan pelanggaran

## 2. Team Recording KPID-SU

Team ini bertugas untuk mensinkronisasi temuan dengan data rekaman (bukti materil)

## 3. Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat(FMPPS)

Perpanjangan tangan KPID di Kabupaten/Kota

## 4. Menerima Aduan Masyarakat

Adanya keluhan dan laporan resmi masyarakat

<sup>30</sup> Khairullah, *Bentuk-Bentuk Pengawasan*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 8 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB

## 5. Fokus Group Discussion (FGD)

Internal (Komisioner dan Staff)

Eksternal (tokoh masyarakat, agama, ahli)

## 6. Pleno Komisioner

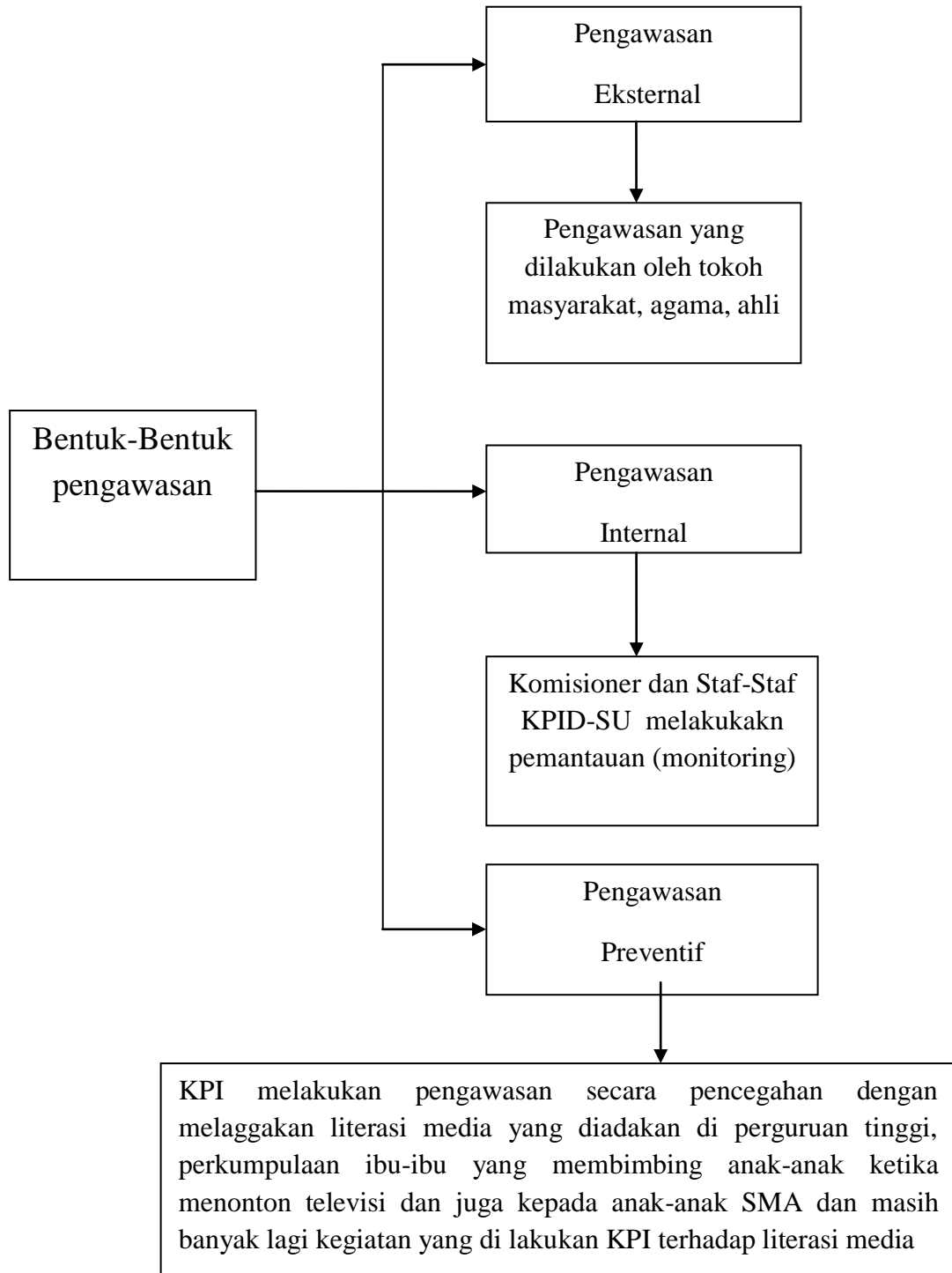
Rapat yang dilakukan oleh anggota KPI dengan menghadirkan pihak media, pengadu serta pihak KPI sendiri untuk memutuskan sanksi apa yang akan didapatkan oleh pihak yang melanggar.

## 7. Putusan (Hasil dari rapat Komisioner)

Bentuk-bentuk pengawasan diatas dapat dipahami bahwa program-program KPID-SU dalam mengawasi ujaran kebencian di televisi sangat begitu tersusun sistematis, mulai dari pemantauan isi siaran, mensinkronisasikan temuan dengan data rekaman sebagai bahan bukti bahwa program tersebut melakukan pelanggaran, bergabung dengan lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan, agama, ras, budaya, maupun kesehatan untuk membantu jika ada kaitan ujaran kebencian terhadap aspek-aspek tersebut.

Bahkan KPID-SU juga menerima jika ada keluhan dan laporan resmi dari masyarakat maupun pihak lainnya, KPID-SU menanggapi hal itu dan dapat didiskusikan ketika mendapati suatu permasalahan dengan pihak internal dan eksternal dan mengadakan rapat dengan anggota yang bersangkutan sehingga mendapatkan keputusan akan kasus atau pelanggaran yang telah dilakukan suatu media maupun isi program siaran.

Gambar 5. Bentuk-Bentuk Pengawasan



### 3. Memberikan Tindakan (Sanksi).

Pencegahan agar kebiasaan meneruskan informasi ujaran kebencian hilang yakni dengan meliterasi masyarakat. “Literasi media harus dilakukan secara massif agar publik dapat semakin cerdas dan selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Sehingga informasi yang disebarkannya nanti informasi yang benar dan juga bermanfaat.

Hasil wawancara peneliti dengan Drs, Jaramen, M AP. Menyatakan:

“Kami akan memberikan sanksi ketika media melakukan pelanggaran baik tentang isi siaran yang dianggap tidak layak ditayangkan maupun program yang berbau ujaran kebencian. Nah, ketika kami sudah memastikan bahwa program itu telah melakukan pelanggaran maka kami akan memberikan teguran yang berupa tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administrasi, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan IPP, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran melalui keputusan pengadilan.”<sup>31</sup>

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Khairullah, S. Ikom. Tentang sanksi yang di dapatkan ketika media melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan dengan menyatakan:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terutama pada pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi “memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”

Pernyataan diatas yang menyatakan setiap yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi didukung dengan pasal 36 ayat (5-6) yaitu:

Pasal 36 ayat (5):

---

<sup>31</sup> Jaramen Purba, *Pengawasan Isi Siaran*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 08 juli 2019, 10: 12 WIB

Isi siaran dilarang (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pasal 36 ayat (6)

Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Hasil wawancara beserta berdasarkan Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa hukuman yang akan didapatkan ketika melanggar suatu aturan dalam program siaran berupa:

a. Mendapatkan teguran

KPI memberikan sanksi administrasi teguran tertulis kepada pihak media yang melakukan pelanggaran Undang-Undang penyiaran.

b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.

Pemberhentian ini dilakukan ketika pihak media tersebut melakukan pelanggaran berulang-ulang dan tidak mau mendengarkan teguran dari pihak KPI

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran

Bagi pihak media yang menayangkan film yang berbaur magic, gaib atau yang menampilkan adegan-adegan yang seksual, maka harus ada batasan durasinya dan waktu siarannya diatas jam 10.00



d. Denda administrasi

Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, pada jumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu

Memberhentikan kegiatan siaran sementara waktu, guna untuk memberikan peringatan bahwa tayangan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi penonton.

f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran

Izin yang ada dari pihak media tidak mau diperpanjang lagi oleh KPI walau mereka berusaha untuk memperpanjang surat izin program siaran.

g. Pencabutan izin penyelenggaraan.<sup>32</sup>

Pencabutan izin ini adalah hal yang terberat bagi media ataupun yang memiliki program siaran dikarenakan ketika surat izin tersebut dicabut maka akan berdampak buruk bagi media karena tidak bisa siaran dan media tersebut akan stop.

Ujaran kebencian fitnah dan penghinaan diatur tersendiri dalam sistem pidana Indonesia, yaitu:

---

<sup>32</sup>Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2016), hlm. 188

1. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa tindakan penistaan dan fitnah diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:
  - a. Penghinaan terhadap wakil negara lain (Pasal 142 KHUP)
  - b. Penghinaan yang dilakukan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara lain (Pasal 142 a KHUP)
  - c. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 & 157 KHUP)
  - d. Penghinaan agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KHUP)
  - e. Penghinaan terhadap agama yang menjalankan tugasnya dan benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 KHUP)
  - f. Penghinaan terhadap kuasa umum diatur dalam Pasal 207 KUHP
  - g. Penistaan (smaad) diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP
  - h. Penistaan dengan surat/ smaadschrift (diatur pada Pasal 315 KUHP)
  - i. Fitnah/ laster (Pasal 311 KUHP)
  - j. Penghinaan ringan/eenvodige belediging (Pasal 315 KUHP)
  - k. Pengaduan untug memfitnah/lasterlijke aanklach (pasal 317 KUHP)
  - l. Tuduhan secara memfitnah (Pasal 318 KUHP )
  - m. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 321 ayat 1 KUHP).<sup>33</sup>

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau

---

<sup>33</sup> <http://: Artikel Reda, Manthovani Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian>, diakses, jumat, 12 juli 2019, pukul 22:05 WIB.

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)". Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pemidanaan atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga diatur pada Pasal 16. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang mengatur mengenai tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atas rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempel atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling 5 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00.<sup>34</sup>

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Undang-Undang tentang sanksi melakukan pelanggaran sebenarnya bukan main-main, akan tetapi pihak televisi yang selalu mementingkan finansial dan masyarakat yang tidak kritisi dan acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang ada di televisi membuat Undang-Undang tersebut tidak dianggap menakutkan karena setelah program atau media tersebut di tegur, mereka hanya sekedar mendengarkan saja dan memberhentikan sementara orang yang

---

<sup>34</sup> Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, ( Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 156

melakukan ujaran kebencian atau pun yang melanggar peraturan. Setelah itu kembali tayang dan mengulang kembali kesalahan yang sama seperti sebelumnya.

#### Pasal 14

1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun
2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.<sup>35</sup>

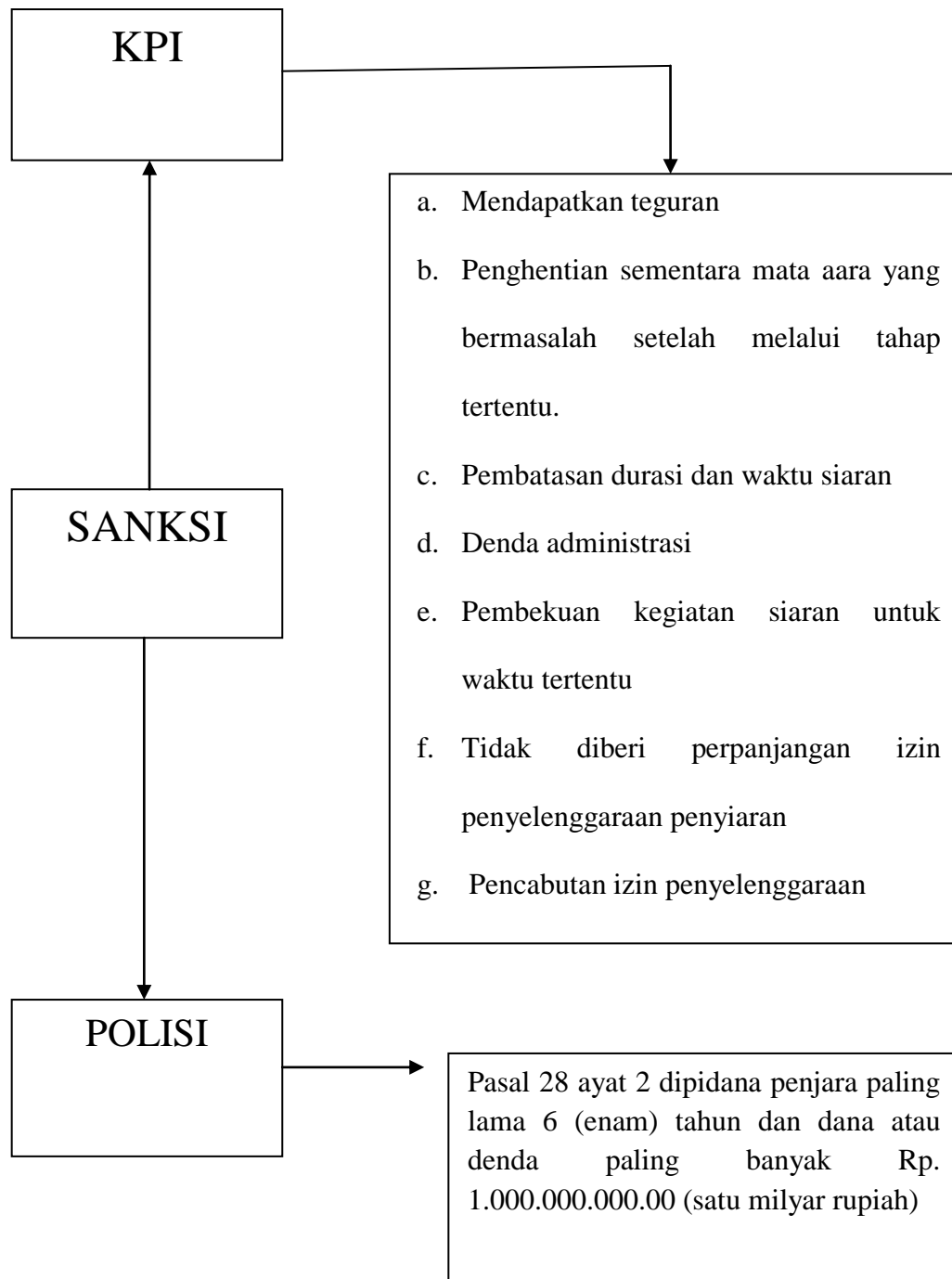
#### Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun”.

---

<sup>35</sup> <http://: Artikel Reda, Manthovani Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian, diakses pada hari jumat, 12 juli 2019, pukul 22:05 WIB.>

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/x/2015 Tahun 2015 tentang pengangan Ujaran Kebencian diterangkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasikan, menghasut, atau penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial.



Gambar 4. Sanksi Melakukan Ujaran Kebencian

## **B. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi.**

Kewenangan KPI-D Sumatera Utara sebagai lembaga negara independen tidak tercermin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, dimana peran KPI merumuskan peraturan pemerintahan tentang penyiaran dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu secara kelembagaan KPI-D Sumatera Utara masih berada dibawah Dinas Hubungan Komunikasi dan Informatikan. Anggaran KPI-D Sumatera Utara juga masih kecil sehingga berpengaruh juga pada kurangnya fasilitas pengawasan yang dimilikinya.<sup>36</sup>

Anggapan bahwa masyarakat Sumatera Utara merupakan masyarakat yang sangat kritis ternyata belum tercermin karena minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aduan. Lembaga penyiaran yang sangat berorientasi pada segi komersial dan mengesampingkan nilai edukasi juga menjadi salah satu hambatan. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi televisi seperti munculnya sistem siaran digital dan *streaming* belum dapat diimbangi oleh KPI-D Sumatera Utara.

Hasil wawancara peneliti dengan Drs, Jaramen, M AP. Menyatakan:

“Memang aturan yang di berikan kepada KPI sebagai lembaga negara yang mengawasi lembaga penyiaran sebenarnya tidak bisa mencabut izin, kalau mungkin dikeluarkannya sanksi atau tegoran yang tertulis, maka mereka akan menjawab “iya, kami akan perbaiki” tapi, nyatanya beberapa minggu sesudah itu diulangi lagi kejadian yang sama, karna sebenarnya sanksi itu hanya memberhentikan sementara program, dan kemudian setelah mereka mendapat teguran bahwa program ini tidak

---

<sup>36</sup> <http://Penelitian> Boby Agus Yusmiono, *Hambatan Televisi Komunitas (Grabag Tv) Membentuk Ruang Publik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), diakses Minggu, 21 Juli 2019, Pukul: 20:59

boleh. Maka, mereka akan mengubah judul dari program tersebut seperti misalnya program yang berjudul Empat mata menjadi Bukan Empat Mata. Artinya kekuatan yang dari regulasi yang ada di KPI itu tidak memiliki kekuatan, makanya KPI sebenarnya mengajukan refisi undang-undang 32 Tahun 2002 di perbaharui, supaya KPI sebagai lembaga pengawas benar-benar punya kekuatan”.<sup>37</sup>

Didukung dengan pernyataan Khairullah, S. Ikom bahwa:

“Disisi lain KPI memang harus mempertimbangkan pemberian sanksi itu dikarnakan televisi ini high reguler bisnis yang sangat menguntungkan dan juga sangat memberatkan dari segi egolasi dan pendapatan. Jadi, KPI tidak bisa serta merta memberikan sanksi menurunkan mereka karena mereka memiliki banyak pekerja yang harus mereka biyai jadi harus sangat bijak dalam pemberian sanksi dan juga prosesnya itu memakan waktu yang tidak sebentar dan ngak gampang. Nah, kebanyakan masyarakat juga berfikir bahwa KPI serta merta memberikan sanksi tidak demikian kita juga harus dengar pakar, harus dengar pendapat dan harus rapat pleno, sehingga sanksi yang diberikan itu benar-benar menyenangkan kedua belah pihak yaitu pihak KPI atau pengadu dan juga pihak televisi itu sendiri tidak bisa sembarangan”.<sup>38</sup>

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa KPI memang tidak sehebat dengan lembaga Negara lain (KPK, KPU, BAWASLU, dll) dibilang “KPID kurang masif” seperti yang diuapkan oleh Bapak Jaramen dan bapak Khairullah, S. Ikom diatas, Bahwa KPI mengakui masalah tersebut, hanya saja juga tidak serta merta KPI tidak bekerja dan tidak melakukan apa-apa. Terbukti bahwa KPI masih tetap melakukan pengawasan dan pelayanan maksimal terhadap TV dan Radio.

Hampir setiap tahun ratusan surat teguran dan klarifikasi yang dikirimkan ke Lembaga Penyiaran yang melanggar aturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan

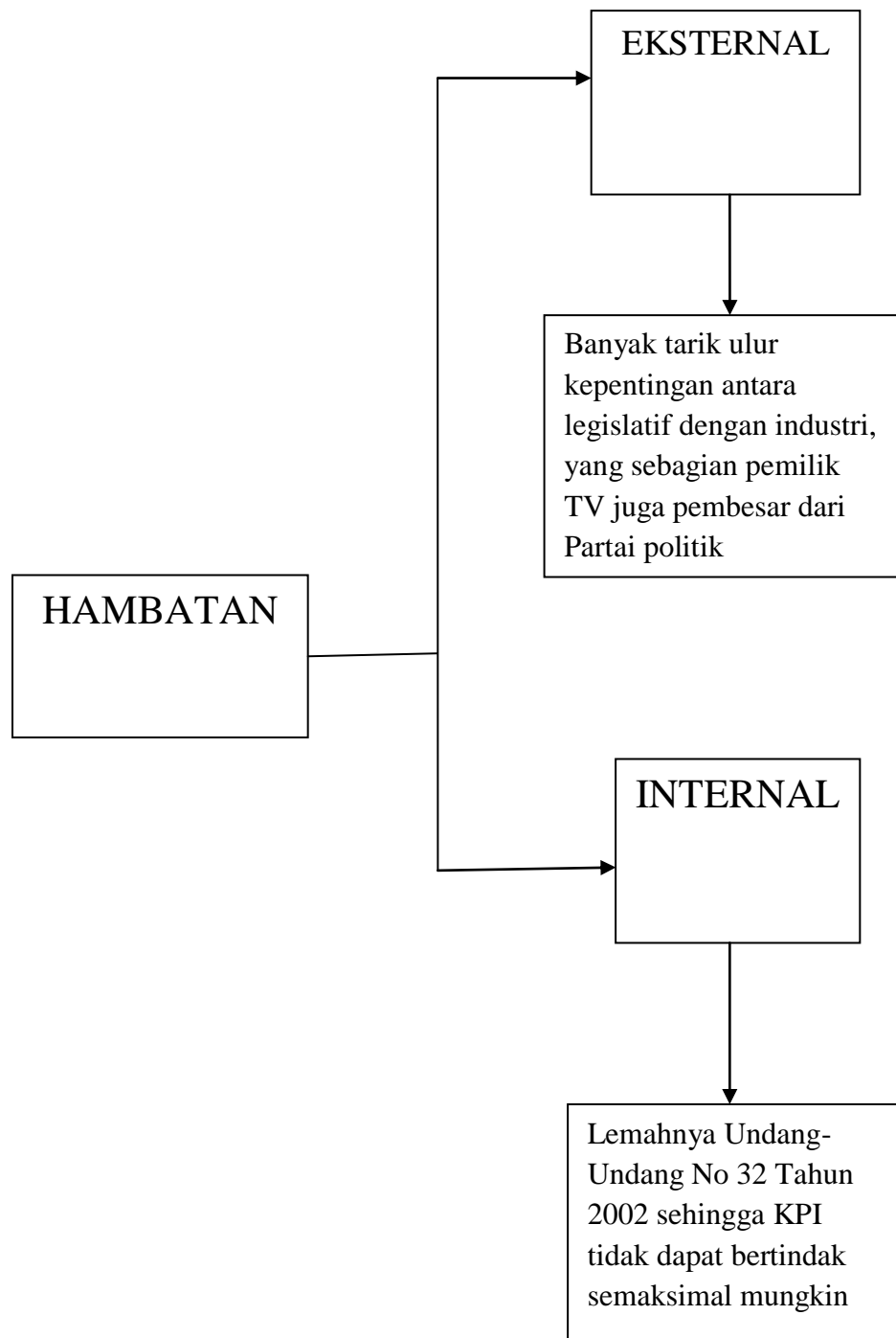
---

<sup>37</sup> Jaramen Purba, *Pengawasan Isi Siaran*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 08 juli 2019, 10: 35 WIB

<sup>38</sup> Khairullah, *Hambatan dalam Mengatasi Pelanggaran*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 8 Juli 2019, Pukul 11:15 WIB



Standar Program Siaran) sampai dengan penghentian tayangan bermasalah. Lembaga Negara ini mengalami masalah dalam Kelembagaan, Undang Undang dikalahkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan aturan lainnya. Dibilang aneh tapi nyata ini memang dialami oleh seluruh KPID di Indonesia. Miris dan sedih melihat kenyataan pahit, tapi ini nyata. Tidak salah ada anggapan KPI sama dengan Lembaga Negara yang Tak Dianggap, karena Pemerintah dan legislatif kurang cepat dan tanggap terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran.



Gambar 5. Hambatan KPID-SU

### C. Solusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Televisi

Ketika timbul suatu permasalahan pasti ada cara atau solusi dalam mengatasi suatu persoalan, begitu juga dengan KPI, jikalau dalam suatu rencana tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan maka, timbullah solusi yang baru untuk mencegah dari peristiwa yang tidak diinginkan, terkait tentang ujaran kebencian, maka solusi yang baik untuk mengurangi pelanggaran aturan penyiaran yaitu:

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Jaramen Purba, M AP ada beberapa solusi dari pernyataan bapak itu yaitu:

**Pertama**, KPI membuatkan sekolah yang diadakan di kantor tersebut dengan mengundang narasumbernya langsung dari KPIP (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat), dan outboard tentang lembaga penyiaran untuk merangkul mereka, jikalau hanya meggunakan kekuatan regulasi kewenangan KPI cukup sulit, makanya di dalam sekolah ini akan diajarkan kepada mereka apa yang boleh dan yang tidak boleh dalam isi siaran. Umpunya dalam pembuatan gambar harus tau aturan mana yang harus diliput, di blur dan di clouse up itu akan di dapatkan di dalam pelajaran penyiaran dan tentang undang-undangnya. Kegiatan dalam sekolah tersebut masih berlanjut sampai sekarang, dan jumlah yang sekolah dalam lembaga KPI ini sudah dua angkata masing-masing 30 dalam satu angkatan dari lembaga penyiaran dan itu belum semua, karna semua ex editornya harus di didik, dikasih pelatihan, dan dikasih sertifikat. **Kedua**, KPI membuat Eworld, KPI dalam setiap tahun biasanya memberikan penghargaan kepada lembaga yang telah menampilkan program bagus dengan adanya penghargaan ini, kemungkinan mereka akan berlomba-lomba untuk membuat program yang lebih baik, kemudian KPI selalu mengumpulkan lembaga penyiaran seperti halnya pemilu, iklan pemilu itu tidak ada yang berisikan konten yang menyudutkan orang lain, dan harus bersikap profesional, itulah yang diusahakan oleh KPI untuk sekarang ini.<sup>39</sup>

Pernyataan diatas didukung juga dengan hasil wawancara bapak Khairullah, S.Ikom yaitu:

---

<sup>39</sup> Jaramen Purba, *Pengawasan Isi Siaran*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 08 juli 2019, 10: 56 WIB.

“Solusi yang di adakan KPI berupa sekolah P3SPS: edukasi dan literasi media bagi masyarakat dan lembaga pendidikan. Kegiatan literasi tersebut sudah mulai di sosoalisasikan kepada perguruan tinggi, kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat lebih peduli dengan konten yang dihadirkan oleh lembaga penyiaran”.<sup>40</sup>

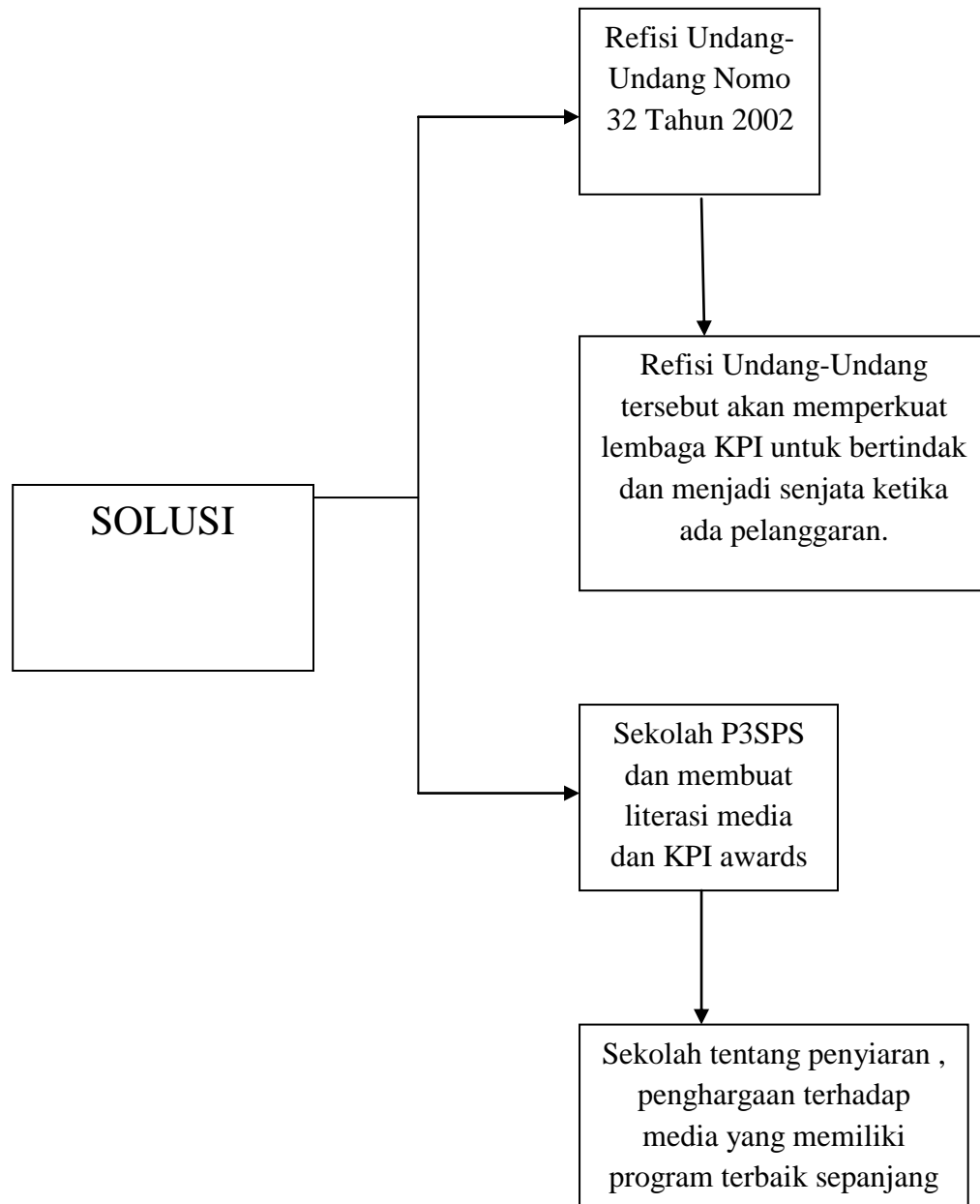
Penjelasan diatas dapat dipahami solusi terbaik lewat revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran, karena Banyak tarik ulur kepentingan antara legislatif dengan industri, yang sebagian pemilik TV juga pembesar dari Partai Politik. penulis berharap di tahun 2019 revisi Undang-Undang Penyiaran bisa rampung diselesaikan legislatif.

Demikian halnya peningkatan kualitas dan variasi siaran, upaya yang lainnya adalah memacu daya kreasi dan inovasi melalui pendidikan dan pelatihan serta riset yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk menghasilkan program siaran yang diminta dan digemari masyarakat. KPI juga menginginkan adanya kesadaran dari internal lembaga penyiaran sendiri dalam hal konten tayangan. Jadi, tak perlu lagi ada teguran dan sanksi jika sudah ada kesadaran dari dalam.

KPI mengarpakan agar peran lembaga KPI diperkuat. Seperti soal perizinan terhadap lembaga penyiaran harus diperjelas “ mana wewenang pemerintah dan mana yang wewenang KPI saat ini kewenangannya.

---

<sup>40</sup> Khairullah, *Solusi dalam Mengatasi Pelanggaran*, Wawancara Pribadi, Kantor KPID-SU, 8 Juli 2019, Pukul 11:20 WIB



Gambar 6. Solusi dalam Mengatasi Pelanggaran

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kesimpulan

Peran KPID Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di Televisi yaitu berupa:

1. Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
2. KPID Sumatera Utara dalam mengawasi ujaran kebencian di televisi yaitu bentuk pengawasan eksternal, bentuk pengawasan internal, bentuk pengawasan preventif.
3. Bagi yang melanggar aturan penyiaran akan mendapatkan sanksi, yaitu: sanksi administrasi dari pihak KPI dan tindak pidana dari polisi.

Hambatan dalam mengatasi pelanggaran adalah aturan yang diberikan kepada KPI sebagai lembaga negara yang mengawasi lembaga penyiaran sebenarnya tidak bisa mencabut izin. Artinya kekuatan yang dari regulasi yang ada di KPI tidak cukup kuat.

Solusi dalam mengatasi pelanggaran adalah KPI membuat Sekolah P3SPS dan melakukan literasi media dan KPI *awards*.

## **B. Saran**

Untuk lebih mengoptimalkan peran KPID-SU dalam mengawasi ujaran kebencian di televisi, ada beberapa antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan, Komisi penyiaran Indonesia, dan DPR segera memperbaharui Undang-Undang penyiaran yang selama ini dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi pertelevisian.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemilik media televisi untuk lebih bijak dalam membuat tayangan-tayangan yang tidak negatif dan berbau ujaran kebencian di televisi.
3. Masyarakat yang kental akan budaya dan pendidikan seharusnya lebih melek media dan kritis terhadap segala macam siaran. Dengan besarnya partisipasi masyarakat maka akan tercipta pengawasan yang kritis dan lebih efektif, sehingga kualitas siaran televisi semakin baik dan edukatif

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. Choirul dan Muhammad Hafiz. 2015. *“SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”*. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3
- Bungin, Burhan. 2007. *Pengertian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bajuri, Adi. 2010. *Jurnalisti k Televisi*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Cangara, Hafied. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Moh. Kemal . 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al quran & Terjemahan Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta.
- Koentjoningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mueleog, Lexy. 2000. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Logos.
- Marhijanto, Bambang. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang.
- Milles, Matthew B, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Pers.
- Mufid, Muhammad. 2005, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Prenada Media.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta: Prenada Media Group.



- Sudarwan, Danim. 2007. *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sujamto. 1986. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafikan.
- Sumadiria, Haris *Hukum dan Etika Media Massa*, Bandung: Simbiosis Rekatama
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Usman, Husaini . 1996. *Metode Penelitian Sosial* , Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002. 2018, *Tentang Penyiaran*, Medan: KPI
- Yusuf, Pawit M. 2009 *Ilmu Komunikasi dan Kepustakaan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wisiyanti, Ninik.1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalah ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Zoebazary, Ilham. 2010. *Kamus Istilah Televisi dan Film*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.google.co.id/amp/s/Sptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-mediasosial-peran-serta-fungsinya/amp/> diakses pada tanggal 27 Maret 2019, pada pukul 23:58 WIB.
- Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (HateSpeech)diIndonesia”tersediadi:[http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasamadengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa diributkan”](http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasamadengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”). Diakses pada tanggal 22 maret 2019.
- <http://www.google.co.id/amp/s/ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-mediasosial-peran-serta-fungsinya/amp/>di akses pada tanggal 1 April 2019, pada pukul 23:58 WIB
- <http://> Artikel Reda, *Manthovani Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian*, diakses, jumat, 12 juli 2019, pukul 22:05 WIB

## Lampiran I

Nama : Drs. Muhammad Syahrir

Jabatan : Koordinator Kelembagaan

Peneliti	Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi?
Informan	<p>Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi, serta mewakili kepentingan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan</li> <li>2. Menetapkan P3SPS</li> <li>3. Publi service- perizinan pendirian LP</li> <li>4. Melakukan pengawasan isi siaran</li> <li>5. Memberi sanksi (pasal 8 ayat 2 huruf a-g)</li> </ol> <p>Tugas dan kewajiban: menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar. Sebagai lembaga yang menjadi pengawas dalam media tentunya sangat berperan terhadap konten di suatu program maupun isi siaran yang telah ditayangkan. Namun, dalam berperannya Komisi Penyiaran Indonesia ini, tetap berpedoman dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.</p>

Peneliti	Apakah semua aturan ataupun pengawasan yang dilakukan berdasarkan pedoman Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 ?
Informan	Ya, semua kegiatan yang bersifat penyiaran baik itu televisi maupun radio tetap berpedoman pada Undang-Undang karena didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bagaimana seharusnya dan apa yang harus dilakukan untuk membuat suatu program acara yang bermanfaat dan mampu mencerdaskan bagi khalayak yang melihat program itu.

## Lampiran II

Nama : Drs. Jaramen Purba, M AP.

Jabatan : Koodinator Isi Siaran

Peneliti	Bagaimanakah bentuk-bentuk Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran Kebencian di Televisi?
Informan	8. Team Pemantau dan Monitoring KPID-SU Team ini bertugas menemukan pelanggaran 9. Team Recording KPID-SU Team ini bertugas untuk mensinkronisasi temuan dengan data rekaman (bukti materil) 10. Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat(FMPPS) Perpanjangan tangan KPID di Kabupaten/Kota 11. Menerima Aduan Masyarakat Adanya keluhan dan laporan resmi masyarakat 12. Fokus Group Discussion (FGD) Internal (Komisioner dan Staff) Ekternal (tokoh masyarakat, agama, ahli) 13. Pleno Komisioner 14. Putusan

Peneliti	Selain Komisi Penyiaran Indonesia siapa aja yang berperan dalam mengawasi ujaran kebencian dalam televisi?
Informan	Komisi Penyiaran Indonesia bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti: Pihak Kepolisian, Kesehatan, MUI, ITE, dan lembaga lainnya

Peneliti	Bagaimanakah tindakan (sanksi) yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara terhadap televisi yang melanggar peraturan tentang tayangan yang berupa ujaran kebencian?
informan	Sanksi administrasi teguran yang berupa tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administrasi, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan IPP, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran melalui keputusan pengadilan. Selama ini yang paling banyak

	dilakukan oleh KPIP dan KPID ialah pemberian sanksi dalam bentuk teguran tertulis. Sebelum dilakukan teguran tertulis, dilakukan pertemuan untuk klarifikasi. Ada juga pemberian sanksi dalam bentuk penghentian sementara dan pembatasan durasi serta waktu siaran. Namun, jumlah dan presentasinya sangat sedikit. Bisa disebut dalam hal pemberian sanksi, KPIP dan KPID bersikap sangat bijaksana. Atas dasar itu pula KPIP dan KPID belum pernah satu kali pun menjatuhkan sanksi denda administrasi
--	---

Peneliti	Selama KPID Sumatera Utara ada, apa sanksi yang paling berat yang diberikan terhadap media yang melanggar?
Informan	Ada, sanksi paling berat adalah dengan mencabut izin siaran dan diberhentikannya suatu program sementara bahkan .

Peneliti	Media dan program apa saja yang sudah mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada?
Informan	RCTI, SCTV, TransTV, Trans 7 dan Indosiar

Peneliti	Bagaimana hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi ujaran kebencian di televisi?
Informan	Aturan yang di berikan kepada KPI sebagai lembaga negara yang mengawasi lembaga penyiaran sebenarnya tidak bisa mencabut izin, kalau mungkin dikeluarkannya sanksi atau tegoran yang tertulis, maka mereka akan menjawab “iya, kami akan perbaiki” tapi, nyatanya beberapa minggu sesudah itu diulangi lagi kejadian yang sama, karna sebenarnya sanksi itu hanya memberhentikan sementara program, dan kemudian setelah mereka mendapat teguran bahwa program ini tidak boleh. Maka, mereka akan mengubah judul dari program tersebut seperti misalnya program yang berjudul Empat mata menjadi Bukan Empat Mata. Artinya kekuatan yang dari regulasi yang ada di KPI itu tidak memiliki kekuatan, makanya KPI sebenarnya mengajukan refisi undang-undang 32 Tahun 2002 di perbaharui, supaya KPI sebagai lembaga pengawas benar-benar punya kekuatan

Peneliti	Apakah solusi yang harus dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam mengatsi ujaran kebencian di televisi?
Informan	<p><b>Pertama</b>, KPI membuatkan sekolah yang diadakan di kantor tersebut dengan mengundang narasumbernya langsung dari KPIP (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat), dan outboard tentang lembaga penyiaran untuk merangkul mereka, jikalau hanya meggunakan kekuatan regulasi kewenangan KPI cukup sulit, makanya di dalam sekolah ini akan diajarkan kepada mereka apa yang boleh dan yang tidak boleh dalam isi siaran. Umpanya dalam pembuatan gambar harus tau aturan mana yang harus diliput, di blur dan di clouse up itu akan di dapatkan di dalam pelajaran penyiaran dan tentang undang-undangnya. Kegiatan dalam sekolah tersebut masih berlanjut sampai sekarang, dan jumlah yang sekolah dalam lembaga KPI ini sudah dua angkata masing-masing 30 dalam satu angkatan dari lembaga penyiaran dan itu belum semua, karna semua ex editornya harus di didik, dikasih pelatihan, dan dikasih sertifikat.</p> <p><b>Kedua</b>, KPI membuat Eworld, KPI dalam setiap tahun biasanya memberikan penghargaan kepada lembaga yang telah menampilkan program bagus dengan adanya penghargaan ini, kemungkinan mereka akan berlomba-lomba untuk membuat program yang lebih baik, kemudian KPI selalu mengumpulkan lembaga penyiaran seperti halnya pemilu, iklan pemilu itu tidak ada yang berisikan konten yang menyudutkan orang lain, dan harus bersikap profesional, itulah yang diusahakan oleh KPI untuk sekarang ini</p>

### Lampiran III

Nama : Khairullah, S. Ikom

Jabatan : Asisten Koordinator Kelembagaan

Peneliti	Seperti apa menurut bapak program KPI meyangkut kepengawasan?
Informan	Kegitan bidang pengawasan isi siaran yang meliputi pemantauan (monitoring) isi lembaga penyiaran: sekolah P3SPS: edukasi dan literasi media bagi masyarakat dan lembaga pendidikan.

Peneliti	Bagaimana menurut bapak tentang kepengawasan KPI?
Informan	KPI melakukan pengawasan secara pencegahan dengan melaggakan literasi media yang diadakan di perguruan tinggi, perkumpulan ibu-ibu yang membimbing anak-anak ketika menonton televisi dan juga kepada anak-anak SMA dan masih banyak lagi kegiatan yang di lakukan KPI terhadap literasi media

Peneliti	Apa hambata KPI dalam mengatasi ujaran kebenaran di televisi?
Informan	KPI memang harus mempertimbangkan pemberian sanksi itu dikarnakan televisi ini high reguler bisnis yang sangat menguntungkan dan juga sangat memberatkan dari segi egolasi dan pendapatan. Jadi, KPI tidak bisa serta merta memberikan sanksi menurunkan mereka karena mereka memiliki banyak pekerja yang harus mereka biyai jadi harus sangat bijak dalam pemberian sanksi dan juga prosesnya itu memakan waktu yang tidak sebentar dan ngak gampang. Nah, kebanyakan masyarakat juga berfikir bahwa KPI serta merta memberikan sanksi tidak demikian kita juga harus dengar pakar, harus dengar pendapat dan harus rapat pleno, sehingga sanksi yang diberikan itu benar-benar menyenangkan kedua belah pihak yaitu pihak KPI atau pengadu dan juga pihak televisi itu sendiri tidak bisa sembarangan



**WAWANCARA DENGAN BAPAK Drs. MUHAMMAD SYAHRIR  
KOORDINATOR KELEMBAGAAN**



**WAWACARA DENGAN BAPAK Drs. JARAMEN PURBA, M, AP  
KOORDINATOR ISI SIARAN**



**BERSAMA TEAM KEPENGAWASAN PROGRAM SIARAN**





**RUANG PENGONTROL SEMUA LEMBAGA STASIUN TELEVISI DAN  
RADIO**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683

Nomor: B-1364/DK.I/TL.00/6/2019

Medan, 26 Juni 2019

Lamp : -

Prihal : **Mohon Izin Riset**

Yang Terhormat :  
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  
Daerah Sumatera Utara

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu :

Nama : Rizka Fadillah  
NIM : 11153024  
Semester : VIII (Delapan)  
TTL : Panyabungan, 31 Oktober 1995  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)  
Alamat : Jl. Tuasan Gg. Musyawarah No. 2b

sedang melaksanakan penulisan skripsi berjudul : **"Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Televisi"**. Untuk kelancaran penulisan dimaksud, mohon bantuan Bapak memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan



Dr. Eri Brata Madya, M.Si  
NIP. 19670610 199403 1003

Tembusan:

-Ketua Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara  
Lembaga Negara Independen**

No : 071/470 /KPID-SU/VII/2019  
Sifat : Biasa  
Perihal : Surat Balasan

Medan, 2 Juli 2019

**Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate  
di\_**

**Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa bernama Rizka Fadillah (NIM. 11153024) dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA Medan, tanggal 26 Juni 2019 dengan nomor surat B-1364/DK.I/TL.00/6/2019, maka melalui hasil rapat pleno komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara diputuskan untuk menerima permohonan izin tersebut, yang telah di disposisi pada Bidang Kelembagaan KPID Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Surat Balasan ini disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**KETUA,**

**PARULIAN TAMPUBOLON, S.Sn**

*Cc. Peringgal*